



**NOTA JAWABAN
RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2027**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
2026**

**JAWABAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN ATAS
PERTANYAAN, SARAN, HIMBAUAN DAN PENDAPAT
FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN KEBUMEN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPBD
TAHUN ANGGARAN 2027**

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang, Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.**

Yth. Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Ysh. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, Kepala Kepolisian Resor Kebumen, dan Komandan Kodim 0709 Kebumen atau yang mewakili.

Ysh. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Para Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Satpol PP, para Kepala Bagian, dan para Camat se Kabupaten Kebumen, wartawan media cetak maupun elektronik, hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD serta pendengar Radio In FM dan Pemirsa Kebumen TV yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Alloh Subkhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga pada hari ini, Jumat tanggal 11 September 2026 kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal afiat tiada halangan suatu apapun.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya tentang jawaban kami sampaikan dengan tata urutan sebagai berikut :

I. JAWABAN / TANGGAPAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN ATAS PERTANYAAN, SARAN, HIMBAUAN SERTA PENDAPAT DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT-RAPAT PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI.

A. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Golkar Demokrat.

1. Terima kasih kami sampaikan atas pandangan Fraksi Golkar Demokrat terkait komposisi pendapatan daerah khususnya ketergantungan pada dana transfer. Kami sepakat bahwa hal ini merupakan perhatian utama yang harus segera diatasi. Masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan penting bagi Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen.
2. Terhadap masukan bahwa belanja daerah harus berorientasi pada hasil, kami sampaikan terimakasih. Kami sependapat bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi manfaat dan dampak dari belanja daerah harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, belanja pembangunan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 akan diarahkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran pada program-program prioritas, khususnya

peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga akan terus memperkuat pengendalian dan evaluasi agar setiap anggaran yang dialokasikan memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Terhadap perhatian dan harapan agar alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat tercermin dalam peningkatan kualitas layanan dan indikator kesejahteraan masyarakat, kami sampaikan terimakasih. Kami berkomitmen untuk terus memastikan agar setiap alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan memberikan hasil yang optimal serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat.

Pada sektor pendidikan, anggaran diarahkan untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, serta memperluas cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

4. Terhadap masukan agar APBD 2027 memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, koperasi, pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, kami sampaikan terimakasih. Pemerintah Kabupaten Kebumen akan terus melakukan penguatan terhadap program pemberdayaan melalui fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas dan pendampingan usaha, pemanfaatan teknologi, penguatan transformasi digital, serta perluasan akses pemasaran.

Upaya tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kewenangan, kemampuan keuangan daerah, ketepatan sasaran, serta efektivitas dan efisiensi penganggaran. Selain itu, Kami juga berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan pelaku usaha dan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Terhadap permintaan agar program penanggulangan kemiskinan dan stunting harus ditangani secara terukur, dilaksanakan secara terpadu, berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta pelaksanaannya dikawal secara serius dan dievaluasi secara berkala, kami sampaikan terimakasih dan mohon dukungan serta kerjasama dalam pelaksanaannya.
6. Terhadap perhatian agar pembiayaan daerah disusun berdasarkan perhitungan yang realistis, terukur, dan

akuntabel, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta keberlanjutan fiskal Kabupaten Kebumen, dapat kami sampaikan bahwa defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya pelampauan target pendapatan daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman.

Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen agar SiLPA ke depan tidak terjadi karena rendahnya penyerapan anggaran, tetapi lebih mencerminkan efisiensi belanja (penghematan tanpa mengurangi volume dan kualitas output) dan pengelolaan APBD yang semakin baik.

7. Kami sependapat bahwa peningkatan kemandirian fiskal perlu terus diperkuat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas belanja. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, optimalisasi pengelolaan aset dan potensi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta pemanfaatan digitalisasi dalam pemungutan dan pengawasan pendapatan daerah.

Di sisi belanja, Pemerintah akan terus melakukan penajaman prioritas dan efisiensi belanja agar ruang fiskal yang tersedia diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya peningkatan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan semakin efektif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

B. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Nasional Demokrat.

1. Terhadap apresiasi dan dukungan dalam penyusunan penyusunan RAPBD 2027 yang komprehensif dan bertemakan “Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” kami sampaikan terima kasih.
2. Terhadap pencermatan rencana pendapatan daerah kami sampaikan terima kasih dan sependapat bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus didorong dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.

3. Terhadap permintaan penjelasan terkait pembangunan infrastruktur fisik, dapat kami sampaikan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 menggunakan asumsi sumber pendanaan pada tahun sebelumnya, mengingat rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 belum ditetapkan dan disampaikan secara definitif oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sumber pendanaan DAK Fisik belum dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Adapun pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur didukung melalui sumber pendanaan, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selanjutnya apabila setelah ditetapkan alokasi TKD Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah Pusat terdapat alokasi DAK Fisik untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen, akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap permintaan penjelasan atas penurunan rencana belanja daerah sebesar 1,13% dari alokasi belanja pada Perubahan APBD 2026, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian kemampuan pendapatan daerah, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan prioritas belanja. Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 menggunakan asumsi sumber pendanaan pada tahun sebelumnya, mengingat rincian alokasi TKD Tahun

Anggaran 2027 belum ditetapkan dan disampaikan secara definitif oleh Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan pagu belanja, dengan tetap memfokuskan anggaran pada program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selanjutnya, apabila rincian alokasi TKD Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Terhadap pandangan Fraksi Partai NasDem, Kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan masukannya. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan pada tahun-tahun mendatang dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi dan masukannya. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam memastikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
7. Terhadap permintaan agar dilakukan optimalisasi alokasi belanja Bidang Pariwisata, dapat kami sampaikan bahwa

terkait konektivitas menuju destinasi wisata, termasuk kawasan Geopark, telah direncanakan program/kegiatan pendukung seperti peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta kelengkapan dan keselamatan jalan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Untuk anggaran di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan akan difokuskan untuk promosi, event, pengembangan destinasi tujuan wisata termasuk SDM pariwisata dan pemenuhan sarana prasarana pendukung visibilitas di situs Geopark.

8. Terhadap dukungan dan harapan Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi Peraturan Daerah yang mampu menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi saat ini dan yang akan datang serta mampu mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kebumen, kami sampaikan terima kasih.

C. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

1. Kami sampaikan terima kasih atas pencermatannya, kami sependapat bahwa perkembangan PAD perlu mendapatkan perhatian serius karena PAD merupakan salah satu indikator kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penetapan target PAD Tahun Anggaran 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan potensi riil masing-masing sumber pendapatan, tren realisasi penerimaan, kondisi perekonomian daerah, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penurunan target pajak daerah tahun 2027 dengan 2026 disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan perlu kami sampaikan dalam komponen pajak daerah didalamnya terdapat 2 jenis pajak yaitu opsen PKB dan BBNKB yang penerimaannya mengacu atas ketetapan pajak PKB dan BBNKB yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, sehingga pemerintah daerah harus berhati - hati dalam menentukan target 2 pajak daerah tersebut mengingat Pemerintah Provinsi memberikan diskon atas pembayaran PKB dan BBNKB.
- c. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan pemetaan terhadap potensi pajak baru baik dari sektor perdagangan, perhotelan, restoran dan hiburan dengan berkolaborasi dengan OPD terkait, salah satunya dengan melakukan identifikasi terhadap usaha atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai objek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemerintah Kabupaten Kebumen pada prinsipnya terus melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh Perangkat Daerah penghasil pendapatan, baik dari

aspek pencapaian target, potensi pendapatan, kualitas perencanaan, pelaksanaan pemungutan, pengawasan, maupun pelaporan penerimaan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD dapat dilaksanakan secara optimal dan setiap OPD penghasil menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

2. Kami sependapat bahwa tingginya proporsi pendapatan transfer merupakan salah satu tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan kebijakan pendapatan daerah, baik dalam jangka menengah maupun jangka Panjang. Langkah-langkah peningkatan kemandirian fiskal dapat dilakukan melalui penguatan basis ekonomi daerah, perluasan sumber-sumber PAD, peningkatan kepatuhan, perbaikan tata kelola, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam jangka menengah akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, percepatan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah, penguatan sinergi pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan pengembangan sektor ekonomi potensial.
3. Terkait dengan tema pembangunan yang harus diwujudkan dalam struktur belanja yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, dapat kami sampaikan:

- a. Terkait korelasi alokasi belanja RAPBD Tahun Anggaran 2027 dengan target penurunan angka kemiskinan, dapat kami sampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dilakukan dengan menerapkan konsep THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial). Konsep tematik sebagai arah kebijakan dalam mencapai target-target pembangunan. Selanjutnya konsep holistik dilakukan dengan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program prioritas beserta target dan pagu indikatif. Program prioritas selanjutnya dijabarkan secara rinci dalam kegiatan hingga sub kegiatan yang secara lengkap (termasuk target, pagu, lokus dan fokus) telah terentri pada SIPD Tahun 2027. Konsep integratif dilakukan dengan melibatkan multistakeholders dari beberapa pemangku kepentingan seperti perangkat daerah, akademisi, jurnalis, komunitas, dunia usaha, legislatif, perangkat daerah tingkat propinsi maupun lembaga/kementerian dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- b. Penentuan calon sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan didasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
- c. Terhadap permintaan penjelasan apabila terdapat alokasi belanja yang tidak sesuai dengan tema pembangunan, kami sampaikan bahwa alokasi belanja

dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 masih dapat dilakukan penajaman dan penyesuaian dalam proses pembahasan bersama DPRD. Dengan demikian, pemaparan program dan alokasi anggaran yang disampaikan bukan merupakan keputusan yang tidak dapat diubah.

Pemerintah bersama DPRD akan terus mencermati kesesuaian program dan kegiatan dengan tema serta prioritas pembangunan Tahun 2027. Apabila terdapat alokasi yang dinilai belum optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka dapat dilakukan penyesuaian melalui pembahasan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan pencapaian target kinerja dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

4. Terhadap pencermatan terkait masih tingginya porsi belanja pegawai, kami sampaikan bahwa Strategi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjaga keseimbangan Belanja Pegawai, Belanja Pelayanan Publik, dan Belanja Pembangunan pada prinsipnya adalah mengendalikan belanja yang bersifat rutin agar ruang fiskal untuk pelayanan publik dan pembangunan semakin besar, tanpa mengurangi kualitas dan kapasitas aparatur.

Selanjutnya untuk proyeksi kebutuhan anggaran untuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu diproyeksikan stabil atau tidak mengalami lonjakan besar mengingat sebagian

besar Non ASN sudah diangkat menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu serta adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang melarang pengadaan Non ASN baru.

5. Terhadap pencermatan dan masukan Fraksi PDI Perjuangan, kami sampaikan terima kasih. Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk mengelola APBD secara cermat dan berhati-hati guna menjaga kesinambungan fiskal, di mana pemanfaatan SiLPA dan penerimaan kembali pinjaman daerah merupakan mekanisme yang sah serta aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke depan, penetapan skala program prioritas daerah akan terus dipertajam melalui efisiensi belanja non-prioritas, pengetatan belanja operasional birokrasi, serta penguatan prinsip *performance-based budgeting* (penganggaran berbasis kinerja). Dengan demikian, alokasi anggaran akan terfokus pada program yang memberikan dampak riil langsung bagi masyarakat, khususnya pada percepatan pemenuhan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi.
6. Terhadap harapan Fraksi PDI Perjuangan mengenai konsistensi antara tema kebijakan, penentuan pagu anggaran pada OPD, serta pemaksimalan aspirasi reses DPRD untuk pengentasan kemiskinan, kami sampaikan terima kasih. Pemerintah Kabupaten Kebumen senantiasa berkomitmen menjaga keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS, hingga RKA-OPD) agar seluruh alokasi dana di setiap Perangkat Daerah

berjalan seiring dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses DPRD dipandang sebagai masukan berharga yang perlu diselaraskan melalui mekanisme verifikasi perencanaan daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk memastikan program kerja tepat sasaran. Alokasi anggaran tersebut akan terus dimaksimalkan pada program perlindungan sosial, peningkatan kapasitas ekonomi warga, serta pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat agar seluruh anggaran terserap secara optimal, akuntabel, dan mengedepankan kepentingan rakyat.

7. Kami sependapat bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 harus menjadi bagian yang berkesinambungan dari perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya, serta tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan besaran anggaran. APBD diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Untuk itu, Kami akan terus melakukan penajaman program dan penganggaran berbasis kinerja agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

D. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan atas Pertanyaan, Saran, Himbauan serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Amanat Sejahtera.

1. Terima kasih atas pencermatan Fraksi Amanat Sejahtera terhadap arah kebijakan RAPBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kabupaten Kebumen sependapat bahwa tema pembangunan harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang konkret, terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi terutama dari capaian output, outcome, dan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan dasar, aksesibilitas, pengembangan pariwisata, serta percepatan penanggulangan kemiskinan.

Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan memperkuat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, dengan menitikberatkan pada pencapaian indikator kinerja dan penyelesaian permasalahan masyarakat. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki manfaat yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Terhadap pandangan Fraksi Amanat Sejahtera yang memberikan perhatian terhadap struktur Pendapatan Daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027, kami sampaikan terima kasih. Pemerintah Kabupaten Kebumen sependapat bahwa penguatan kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu tantangan sekaligus

prioritas yang perlu mendapatkan perhatian secara berkelanjutan, kemudian terhadap upaya peningkatan PAD harus dilakukan secara sehat dan tidak semata-mata melalui peningkatan tarif atau penambahan beban kepada masyarakat dan dunia usaha. Masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen.

3. Terhadap pencermatan belanja daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2027, kami ucapkan terimakasih. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Belanja operasi yang mencapai Rp2,068 triliun sebagian besar merupakan belanja yang bersifat mengikat. Belanja tersebut antara lain:
 - 1) Belanja Pegawai: Gaji dan tunjangan ASN, serta P3K untuk memastikan pelayanan publik (guru, tenaga kesehatan, dan administrasi) tetap berjalan dengan baik.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa: Biaya operasional sekolah (BOS), operasional puskesmas, obat-obatan, serta pemeliharaan fasilitas publik. kami berkomitmen untuk terus melakukan refocusing dan pembatasan pada belanja operasional yang kurang prioritas agar dialihkan ke program yang menyentuh masyarakat.
 - b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp366,67 miliar (11,86%) akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah namun kami memastikan pengalokasiannya dilakukan secara cermat dan berdasarkan prioritas. Anggaran ini difokuskan pada infrastruktur dasar

yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti: Perbaikan jalan dan jembatan rusak untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, Rehabilitasi fasilitas pendidikan dan pemenuhan alat kesehatan pada rumah sakit/puskesmas pembantu.

4. Terhadap pencermatan dan pandangan Fraksi Amanat Sejahtera, kami sampaikan terima kasih. Pemerintah Kabupaten Kebumen sependapat bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun oleh Anggota DPRD harus memiliki alur perencanaan dan penganggaran yang jelas serta terintegrasi secara nyata ke dalam program dan kegiatan RAPBD. Dalam penerjemahannya ke dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Kebumen memastikan setiap usulan pikir ditelaah secara objektif melalui tahapan verifikasi dan validasi kesesuaian dengan RPJMD, KUA-PPAS, skala prioritas pembangunan daerah, kesiapan teknis pelaksanaan, serta kemampuan kapasitas fiskal yang tersedia. Apabila terdapat pokok-pokok pikiran yang belum atau tidak dapat terakomodasi seluruhnya pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk memberikan penjelasan secara transparan mengenai kriteria, evaluasi kelayakan, dan ketersediaan alokasi anggaran, sehingga proses penganggaran tetap berjalan secara akuntabel, rasional, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan aspirasi masyarakat.
5. Terhadap masukan dan perhatian Fraksi Amanat Sejahtera terkait pentingnya pemenuhan infrastruktur dasar dan pemerataan pembangunan hingga tingkat desa, kami sampaikan terima kasih. Pemerintah Kabupaten Kebumen sependapat bahwa alokasi belanja

infrastruktur tidak hanya difokuskan pada kegiatan berskala besar, tetapi diprioritaskan secara seimbang untuk menangani kebutuhan nyata masyarakat di pedesaan, seperti perbaikan jalan, jembatan, irigasi, drainase, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih, serta infrastruktur pendukung ekonomi. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen menempatkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang bersumber dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat sebagai rujukan data dan informasi yang sangat krusial untuk mengidentifikasi persoalan konkret di lapangan. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran infrastruktur dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan berpatokan pada prinsip prioritas, urgensi pemanfaatan, serta asas pemerataan wilayah guna mendukung kemudahan aksesibilitas pelayanan dasar dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara merata.

6. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pandangan, saran, dan komitmen Fraksi Amanat Sejahtera dalam mengawal penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Kami sepakat bahwa kebijakan pengelolaan defisit sebesar Rp75,23 miliar dan pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati, efisien, terukur, serta berbasis pada perencanaan yang matang.

a. pertama terkait penggunaan SILPA dan Pembiayaan defisit, kami sependapat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak boleh dijadikan instrumen rutin yang mengindikasikan lemahnya perencanaan atau eksekusi anggaran oleh karena itu

kami terus berkomitmen melakukan asistensi program belanja secara lebih riil agar target SiLPA ke depan dapat terus ditekan ke angka yang paling minimal. dan perlu kami jelaskan bahwasanya terjadinya SiLPA pada tahun-tahun sebelumnya tidak selalu disebabkan oleh rendahnya penyerapan program belanja, melainkan sering kali dipengaruhi oleh adanya pelampauan target pendapatan daerah serta efisiensi belanja (penghematan tanpa mengurangi volume dan kualitas output).

- b. Terkait Evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kami menerima dengan baik catatan Fraksi Amanat Sejahtera bahwa "setiap rupiah harus memiliki target manfaat yang jelas." Sebagai langkah konkret ke depan, kami berkomitmen untuk memastikan setiap alokasi anggaran dalam RAPBD 2027 berbasis pada Performance-Based Budgeting (Anggaran Berbasis Kinerja) yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah serta menjadikan sisa anggaran yang tidak terserap sebagai bahan evaluasi triwulanan yang ketat untuk mengukur kinerja kepala perangkat daerah, sekaligus menyempurnakan kualitas perencanaan di tahun berikutnya.
7. Pemerintah Kabupaten Kebumen sependapat dengan Fraksi Amanat Sejahtera bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 akan dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan berbasis data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki tujuan, sasaran penerima manfaat, lokasi kegiatan, serta indikator kinerja yang jelas dan terukur. Kami juga memastikan bahwa alokasi anggaran disusun secara cermat berbasis kebutuhan riil di lapangan (*money follows program*), bukan sekadar berdasarkan keinginan atau pembagian yang tidak terukur. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai tidak hanya besaran anggaran, tetapi juga manfaat dan hasil yang dicapai.

Terkait pokok-pokok pikiran DPRD, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan memastikan seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari pengusulan, verifikasi, sinkronisasi dengan prioritas pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, serta mencegah terjadinya intervensi dan penganggaran yang tidak sesuai ketentuan. Kami menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI sejak tahap perencanaan/RKPD sampai dengan pertanggungjawaban sehingga prosesnya dipantau secara digital untuk meminimalisir kesalahan. Informasi ini nantinya dapat diakses oleh publik melalui portal transparansi anggaran daerah sebagai wujud akuntabilitas publik.

8. Pemerintah Kabupaten Kebumen sependapat bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah mitra kerja yang sejajar, bukan untuk saling melemahkan. Kemitraan tersebut dilandasi prinsip *checks and balances*, sinergi, dan tanggung jawab

bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai amanat undang-undang, keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang harus berjalan beriringan guna mencapai visi pembangunan daerah. Kami juga mengucapkan terimakasih atas masukan, saran, dan evaluasi agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan lebih tepat sasaran, akuntabel, dan transparan untuk kepentingan seluruh masyarakat kebumen.

Dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen membangun komunikasi dan pembahasan yang konstruktif, objektif, dan terbuka. Orientasi utama bukan pada kepentingan masing-masing pihak, melainkan pada kualitas kebijakan dan anggaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

9. Terimakasih atas semua masukan dan saran yang disampaikan oleh Fraksi Amanat Sejahtera, kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama yang sinergis dan kami juga mengajak jajaran Badan Anggaran DPRD bersama TAPD untuk segera melakukan pembahasan lebih lanjut secara mendalam, demi memastikan APBD ditetapkan tepat waktu dan sepenuhnya berorientasi pada kemakmuran masyarakat Kebumen.

E. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

1. Terhadap pencermatan dan masukan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai optimalisasi potensi unggulan daerah serta keprihatinan atas risiko *shortfall* pendapatan, kami sampaikan terima kasih. Dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak hanya menaikkan target secara kalkulatif/matematis, tetapi berkomitmen memperkuat *roadmap* optimalisasi PAD melalui langkah-langkah berikut:
 - a. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Memberikan kebijakan insentif fiskal daerah kepada wajib pajak daerah melalui pembebasan denda PBB dan pemberian diskon pokok ketetapan piutang PBB;
 - c. Memperluas Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk memastikan pemungutan pajak dan retribusi berlangsung secara efisien, transparan, dan akuntabel;
 - d. Melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kebumen, melalui Surat Kuasa Khusus untuk melakukan penagihan piutang Pajak Daerah;
 - e. Melakukan inventarisasi dan optimalisasi tanah, bangunan, dan aset *idle* yang dapat disewakan, dikerjasamakan, atau dikembangkan untuk meningkatkan PAD; dan
 - f. Melakukan evaluasi kinerja BUMD secara berkala, penataan tata kelola, serta analisis kelayakan sebelum

pengalokasian investasi/penyertaan modal agar BUMD mampu memberikan kontribusi dividen secara optimal.

Di samping itu, potensi sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata, UMKM, dan perikanan terus didorong agar menjadi basis pertumbuhan ekonomi baru, sehingga target penerimaan PAD yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan mampu meminimalkan risiko *shortfall* anggaran demi menjaga kesinambungan program-program prioritas bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

2. Terhadap pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami sependapat bahwa APBD harus menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Daerah terus melakukan penajaman alokasi belanja agar lebih berfokus pada program produktif melalui penguatan UMKM, pemberdayaan sektor pertanian, pelaksanaan program padat karya, dan penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Pembangunan infrastruktur juga terus diarahkan untuk mendukung konektivitas, produktivitas ekonomi, serta kelancaran distribusi hasil pertanian dan produk UMKM.

Mengenai usulan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait pengalokasian minimal 30 persen belanja langsung untuk sektor produktif, Pemerintah Daerah menyambut baik usulan tersebut sebagai masukan penting dalam pembahasan dan

penyempurnaan APBD TA 2027. Kendati demikian, pengalokasiannya akan tetap disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta skala prioritas pembangunan. Pemerintah Daerah juga berkomitmen memastikan APBD TA 2027 tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Kebumen.

3. Terhadap pencermatan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami sampaikan terima kasih. Pemerintah Daerah sependapat bahwa efektivitas dan efisiensi Belanja Operasi perlu terus ditingkatkan agar ruang fiskal untuk Belanja Modal dapat lebih optimal. Namun demikian, komposisi belanja tetap mempertimbangkan kewajiban belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Pemerintah akan terus melakukan penajaman dan efisiensi Belanja Operasi serta mengarahkan ruang fiskal yang tersedia untuk memperkuat Belanja Modal, khususnya pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan pariwisata yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Melalui evaluasi penataan belanja secara konsisten dan terukur, Pemerintah Daerah akan mengupayakan redistribusi anggaran agar porsi belanja investasi daerah dapat terus ditingkatkan secara efektif

demikian menopang pencapaian target prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

4. Terhadap pencermatan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait anggaran belanja hibah fasilitasi bina mental spiritual sebesar Rp9,52 Miliar, kami sampaikan terima kasih. Pemerintah Daerah sependapat bahwa pengelolaan belanja hibah harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Proses pengalokasian dan penyaluran belanja hibah pada TA 2027 dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi, validasi usulan, kelengkapan administrasi/legalitas penerima, serta pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menghindari permasalahan penyaluran.
5. Terhadap perhatian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai pelaksanaan dan pengintegrasian Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil reses, kami sampaikan terima kasih. Pemerintah Daerah juga memandang bahwa Pokir DPRD merupakan amanat aspirasi masyarakat yang sangat penting. Untuk menghindari kendala verifikasi dan kegagalan penetapan penerima manfaat, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, serta sinkronisasi sejak tahap awal perencanaan antara Pokir DPRD dengan RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD TA 2027 melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai batasan waktu dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

6. Terhadap pertanyaan mengenai kepastian asumsi SiLPA untuk menutup defisit anggaran serta rencana pengeluaran pembiayaan/penyertaan modal BUMD sebesar Rp14,44 miliar, dapat kami sampaikan bahwa penggunaan estimasi SiLPA tersebut merupakan mekanisme menutup defisit anggaran yang sah dan aman sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Daerah akan memperhitungkan SiLPA secara cermat berdasarkan potensi riil pelampauan target maupun efisiensi belanja. Selanjutnya terkait penyertaan modal kepada BUMD, Pemerintah Daerah juga memastikan bahwa setiap rupiah penyertaan modal didasarkan pada Peraturan Daerah, kajian analisis kelayakan investasi yang komprehensif, penetapan indikator kinerja/dividen yang terukur, serta evaluasi manajemen risiko demi menjaga kesinambungan fiskal daerah.
7. Terhadap harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar penyusunan dan pembahasan Raperda APBD TA 2027 senantiasa selaras dengan prioritas KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama, kami sampaikan terima kasih. Bersama Badan Anggaran DPRD Kebumen, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan pembahasan secara mendalam, cermat, dan teliti agar APBD TA 2027 benar-benar menjadi instrumen efisien dalam mewujudkan visi-misi daerah dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen.

F. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

1. Terhadap pertanyaan mengenai strategi mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya intensifikasi dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pendataan dan pemutakhiran basis data pajak daerah, optimalisasi pemungutan dan pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak daerah, serta penggalan potensi dari objek pajak yang selama ini belum optimal.

Sementara itu, langkah ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan identifikasi dan penggalan sumber-sumber PAD baru, termasuk memperluas basis data dan objek pajak serta mengoptimalkan pemanfaatan aset dan potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, seluruh upaya tersebut tetap dilaksanakan secara terukur, bertahap dan memperhatikan kondisi masyarakat serta kemampuan ekonomi daerah, dengan mempertimbangkan isu dan kebijakan nasional serta menjaga kondusifitas wilayah. Pemerintah Daerah tidak semata-mata mengejar peningkatan PAD, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan pendapatan tidak

menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat maupun menghambat aktivitas perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap potensi dan capaian PAD, meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, serta menyusun langkah-langkah optimalisasi PAD yang realistis dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat terus diperkuat tanpa mengabaikan aspek pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kondusifitas wilayah.

2. Terhadap saran dan masukan Fraksi PKB, kami sependapat bahwa alokasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2027 masih bersifat asumsi. Setelah alokasi resmi ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan melakukan penyesuaian secara transparan melalui penajaman dan/atau refocusing belanja dengan tetap menjaga program prioritas pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.
3. Terhadap pencermatan Fraksi PKB, kami sampaikan penjelasan bahwa terdapat penyesuaian rincian belanja antara PPAS Tahun Anggaran 2027 dengan Rancangan APBD sebagai bagian dari proses pemutakhiran dan penajaman penganggaran dengan memperhatikan kebutuhan riil, kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta prinsip efisiensi dan kewajaran anggaran.

Pada Belanja Operasi terjadi peningkatan sebesar Rp1,47 miliar, yang berasal dari peningkatan Belanja Pegawai sebesar Rp939,06 juta dan Belanja Hibah sebesar Rp2,00 miliar, yang diimbangi dengan penurunan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,47 miliar.

Pada Belanja Modal terjadi penurunan sebesar Rp1,47 miliar, terutama pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp2,78 miliar, yang disertai penyesuaian pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1,45 miliar serta komponen belanja modal lainnya.

Sementara itu, Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar Rp4,27 juta, yang berasal dari penyesuaian Belanja Bagi Hasil sebesar Rp4,29 juta dan peningkatan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp20 ribu.

Penyesuaian tersebut tidak mengubah total Belanja Daerah, yang tetap sebesar Rp3,09 triliun.

4. Terhadap saran dan masukan Fraksi PKB, kami sependapat bahwa besaran SiLPA Tahun Anggaran 2026 belum dapat diketahui secara pasti karena baru dapat ditetapkan setelah tahun anggaran berakhir dan proses pemeriksaan LKPD. Oleh karena itu, SiLPA sebesar Rp109,67 miliar dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 merupakan proyeksi, yang disusun berdasarkan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun 2026, antara

lain potensi pelampauan PAD sebesar Rp1,00 miliar dan perkiraan penghematan belanja sebesar Rp84,35 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kebumen menyadari bahwa realisasi SiLPA dapat berbeda dari proyeksi. Oleh karena itu, setelah realisasi akhir Tahun Anggaran 2026 diketahui, pemanfaatan SiLPA akan disesuaikan dengan kondisi riil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Terhadap perhatian, saran, dan masukan dari Fraksi PKB, kami sependapat bahwa penyesuaian Pendapatan Transfer setelah terbitnya Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2027 perlu dilakukan secara transparan dan disampaikan kembali kepada DPRD. Penyesuaian tersebut akan dilakukan dengan tetap menjaga prioritas pembangunan dan kesepakatan dalam KUA-PPAS serta sesuai dengan kemampuan fiskal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Terhadap pandangan Fraksi PKB, Pemerintah Daerah siap memberikan penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut atas catatan tersebut dalam forum pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Terhadap saran dan masukan Fraksi PKB, Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa sampai dengan 10 September 2026, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1,97 triliun atau 67,39% dari pagu Rp2,92 triliun, sedangkan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1,73

triliun atau 57,53% dari pagu Rp3,00 triliun. Rincian realisasi pendapatan dan belanja tercantum dalam LRA sebagai bahan pembandingan dan verifikasi asumsi RAPBD Tahun Anggaran 2027.

8. Terhadap perhatian dan komitmen Fraksi PKB dalam mengawal pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih dan sependapat bahwa setiap alokasi anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, dengan tetap mengutamakan pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta penanggulangan kemiskinan sesuai prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Daerah akan terus melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

G. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Gerindra.

1. Terimakasih atas pencermatan struktur Pendapatan Daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 khususnya Pendapatan Daerah. Dapat kami sampaikan bahwa:
 - a. Potensi PAD khususnya Pajak dan Retribusi Daerah yang belum teroptimalisasi sampai dengan saat ini sebesar Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima

puluh juta rupiah) dan retribusi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Target tambahan PAD yang secara realistis dapat diperoleh melalui optimalisasi basis data dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Tahun Anggaran 2027 khususnya untuk Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 2% dari target 2027.
 - c. Kami sampaikan untuk realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 580.484.058.430,00 (lima ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan Realisasi PAD Tahun 2026 s.d tanggal 31 Agustus 2026 sebesar Rp. 376.453.998.299,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
2. Terhadap pencermatan belanja operasi, kami sampaikan terimakasih. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya untuk memenuhi batas maksimal belanja pegawai dibawah 30%, pada RAPBD Tahun Anggaran 2027 proporsi belanja pegawai sebesar 29,78% dibawah batas maksimum. Selain hal tersebut juga kami sampaikan bahwa:
- a. Porsi/persentase alokasi Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebesar Rp1.674.692.649.611,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan

puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah) Khususnya dalam mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun sebagai penunjang.

b. Belanja barang/jasa yang menghasilkan output/outcome langsung bagi masyarakat sebesar Rp.526.860.622.334,00 (lima ratus dua puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Sedangkan belanja barang/jasa operasional rutin birokrasi sebesar Rp.265.565.046.374,00 (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh lima juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

3. Terimakasih atas perhatian dan masukan terkait belanja modal pada RAPBD Tahun Anggaran 2027. Dapat kami sampaikan bahwa:

a. Survey jalan dan jembatan dilaksanakan 1 tahun sekali, dan pelaksanaanya pada bulan September sd Desember setiap tahunnya. Untuk kondisi jalan tahun 2026, belum dilakukan survey dan belum ada data terupdate. Sementara untuk kondisi jalan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi Baik : 470,96 km = 46,30%
- 2) Kondisi Sedang : 284,43 km = 27,96%
- 3) Kondisi Rusak Ringan : 139,03 km = 13,66%
- 4) Kondisi Rusak Berat : 122,73 km = 12,06%

b. Tahun 2027 target rencana penanganan jalan yaitu sepanjang 52 Km baik dari penanganan rutin maupun

pemeliharaan/pelebaran/pembangunan jalan. Sedangkan target rencana penanganan jaringan irigasi yaitu sepanjang 5,1 Km baik dari pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi permukaan.

- c. Indikator penentuan prioritas penanganan jalan yaitu sesuai dengan tema pembangunan tahun 2027 "Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan" dan usulan musrenbang. Dengan total anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp 181.005.445.312,00 (seratus delapan puluh satu miliar lima juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari 12 Sub Kegiatan dengan rincian lokasi sebagaimana terlampir.

Indikator penentuan prioritas penanganan jaringan irigasi yaitu sesuai dengan tema pembangunan tahun 2027 "Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan" dan usulan musrenbang. Dengan total anggaran Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 12.824.227.486,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan

puluh enam rupiah) dengan rincian lokasi sebagaimana terlampir.

4. Terhadap pandangan Fraksi Gerindra terkait bidang pendidikan, mendorong agar anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan sarana dan prasarana kami ucapkan terima kasih. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyampaikan bahwa:

a. Pada sektor pendidikan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat kami sampaikan:

- 1) Jumlah ruang kelas SD kondisi rusak sedang sebanyak 1077 ruang, sedangkan rusak berat 561 ruang.
- 2) Pada tahun 2027 untuk jenjang SD bisa menangani rehabilitasi ruang kelas sebanyak 33 unit dan sarpras utilitas sebanyak 66 unit, pembangunan ruang kelas 14 unit dan Pembangunan Ruang perpustakaan 2 unit.
- 3) Jumlah ruang kelas SMP kondisi rusak sedang sebanyak 355 ruang atau 22%, sedangkan rusak berat 103 ruang atau 6,5% dari total ruang kelas SMP sebanyak 1587 ruang.
- 4) Pada tahun 2027 untuk SMP bisa menangani rehabilitasi 56 ruang kelas dan sarpras utilitas 33 unit, pembangunan ruang kelas 2 unit dan pembangunan sarpras utilitas 6 unit.

b. Pada sektor kesehatan dapat kami sampaikan:

- 1) Target cakupan UHC Tahun 2027 adalah 99,07 % dengan menggunakan data penduduk semester II Tahun 2026 sejumlah 1.463.147 Jiwa.
 - 2) Capaian terkini prevalensi stunting sebesar 7,5% dan target tahun anggaran 2027 sebesar 9,05%.
 - 3) Jumlah kematian ibu sampai dengan bulan agustus Tahun 2026 sebanyak 3 orang, Target AKI tahun 2027 adalah berjumlah 14 orang.
 - 4) Jumlah Kematian balita sampai dengan Agustus tahun 2026 sebanyak 74 orang (5,96%). Target AKABA Tahun 2027 adalah 11,36 %.
 - 5) Melakukan identifikasi masalah yang ada dengan monitoring dan evaluasi.
 - 6) Melakukan pendampingan Tim Ahli Dokter Spesialis Anak dan Obgyn dari 12 rumah sakit ke 35 Puskesmas.
5. Terimakasih atas pandangan yang disampaikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Disperindag KUKM menargetkan seluruh sasaran pada program pengembangan UMKM RAPBD 2027 dapat naik kelas secara bertahap sesuai dengan karakteristik program yang dilaksanakan. Akselerasi kenaikan kelas yang signifikan dan terukur (*scaling-up*) dititikberatkan pada 90 UMKM inkubasi bisnis melalui pendampingan end-to-end, mentoring, dan pelatihan intensif dengan target naik kelas, omzet meningkat, membuka lapangan kerja dan memperluas pasar.

Sementara itu, 1.000 UMKM yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan (subsidi bunga) didorong naik kelas melalui penguatan permodalan untuk

meningkatkan usaha dengan mengurangi beban bunga pinjaman, serta 120 UMKM melalui pelatihan penguatan produk usaha difokuskan pada peningkatan mutu dan daya saing produk. Impact yang ditargetkan pada seluruh kegiatan pada program pengembangan UMKM adalah naik kelas, omzet meningkat, membuka lapangan kerja dan memperluas pasar. Pasca pelaksanaan program juga akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi program.

6. Terhadap pencermatan bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit sebesar Rp75,228 miliar yang ditutup dari adanya Pembiayaan Netto, dapat kami sampaikan bahwa SiLPA tersebut merupakan akumulasi dari beberapa komponen, meliputi pelampauan pendapatan, sisa penghematan atau efisiensi belanja, serta sisa anggaran dari kegiatan yang tidak atau belum seluruhnya dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Adapun rincian SiLPA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Penghematan Belanja Operasional dan Modal Rp84.352.061.000,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh satu ribu rupiah).
- c. Penghematan Belanja Barang Jasa dan Modal BLUD Rp24.319.800.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Sedangkan rencana penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2027 antara lain:

- a. Belanja Gaji PPPK Penuh waktu dan PPPK Paruh Waktu RSUD Rp19.107.800.000,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Penyertaan Modal BUMD Rp14.444.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah).
- c. Pembentukan Dana Cadangan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- d. Belanja Daerah Lainnya yang mendukung program prioritas Kabupaten Kebumen Rp56.120.061.000,00 (lima puluh enam miliar seratus dua puluh juta enam puluh satu rupiah).

II. PENUTUP

Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf manakala Nota Jawaban/Tambahan penjelasan ini masih ada kekurangannya, namun kami berharap Jawaban dan Tambahan Penjelasan ini dapat lebih memperjelas hal-hal yang dipertanyakan.

Semoga Alloh Subkhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Kebumen, 11 September 2026

BUPATI KEBUMEN



Hj. LILIS NURYANI

LAMPIRAN

RENCANA PEKERJAAN SALURAN IIRIGASI TAHUN 2027

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu 2027	Lokasi
A	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp12.824.227.486	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp8.199.227.486	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Banyu Urip Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bonosari Desa Bonosari Kecamatan Sempor Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jombret Desa Seboro Kecamatan Sadang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kali Petir Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedung Jati Desa Kedungjati Kecamatan Sempor Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pekuncen Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Plumbon 2 Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pujotirto Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Rowokele Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Seboro I Desa Seboro Kecamatan Sadang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wadasmalang Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedungsingih Desa Sadang Wetan Dan Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Langen Ujung Desa Buayan Kecamatan Buayan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Giyanti II Desa Giyanti Kecamatan Rowokele Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sampang I Desa Sampang Kecamatan Sempor Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kali Gombong I Desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gambar Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wagirpandan Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1.500.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kali Lo Desa Wonosari Kecamatan Sadang Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kali Sabuk Desa Wonosari Kecamatan Sadang Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Klangon Desa Candi Kecamatan Karanganyar Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Glempang Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kali Kendo Atas Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp2.000.000.000	Pemeliharaan rutin dan penanganan darurat Saluran Irigasi Kewenangan Kabupaten
4	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp525.000.000	
5	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Rp600.000.000	

Lokasi Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2027

No. Rek	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Pagu Anggaran	Target	Satuan	Lokasi Ruas Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan	Presentase Jalan Dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Rp181.005.445.312,00			
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang Tertangani	Rp181.005.445.312,00	52	KM	
1.03.10.2.01.0028	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	Rp250.000.000,00	5	Dokumen	
1.03.10.2.01.0029	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	Rp1.000.000.000,00	18	Dokumen	
1.03.10.2.01.0053	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	Rp650.000.000,00	1017,15	KM	
1.03.10.2.01.0056	1.03.10.2.01.0049 - Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	Rp1.960.000.000,00	30	Meter	Pelebaran Jembatan Grecek pada Ruas Jalan Selokerto - Buayan Pelebaran Jembatan Grenggeng 2 ruas Grenggeng - Pohkumbang Pelebaran Jembatan Prekutukan pada Ruas Jalan Peniron - Karanggayam Pelebaran jembatan Trenggulun Ds, Madureso Kec, Kuwarasan pada ruas jalan Mangli-Karangsari
1.03.10.2.01.0052	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	Rp15.000.000.000,00	9	KM	Belanja Pemeliharaan: Pemeliharaan Jalan Kabupaten Kebumen (289 Ruas Jalan) oleh Tim URC di 4 Wilayah UPTD PBPJJ DPUPR, dan penanganan lainnya [-] Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Wilayah UPTD PBPJJ Gombong [-] Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Wilayah UPTD PBPJJ Karanganyar [-] Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Wilayah UPTD PBPJJ Kebumen [-] Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Wilayah UPTD PBPJJ Kutowinangun
1.03.10.2.01.0068	1.03.10.2.01.0052 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	Rp350.000.000,00	52	KM	

No. Rek	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Pagu Anggaran	Target	Satuan	Lokasi Ruas Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01.0067	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	Rp54.095.032.210,00	12	KM	Pembangunan Jalan Giritirto - Plipitan Pembangunan Jalan Gunungsari - Selogiri Pembangunan Jalan Kalikudu - Plumbon Pembangunan Jalan Kalireja - Kenteng Pembangunan Jalan Karangsari - Babadsari Pembangunan Jalan Kenteng - Ketileng Pembangunan Jalan Kreteg - Giyanti Pembangunan Jalan Langse - Pujegan Pembangunan Jalan Lerep - Karangtengah Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Karangsambung - Sadang Pembangunan Jalan Pagebangan - Somagede Pembangunan Jalan Pandansari - Watulawang Pembangunan Jalan Sadangkulon - Cangkring Pembangunan Jalan Sadangkulon - Srisip Pembangunan Jalan Sadangwetan - Kedunggong Pembangunan Jalan Tunjungseto - Giyanti Pembangunan Jalan Wadasmalang - Sadangkulon Pembangunan Jalan Wonoharjo - Giyanti Pembangunan Jalan : Pengadaan Tanah untuk Jembatan Brangkal 2 Pembangunan Jalan Karanggayam Klopogodo Pembangunan Jalan Banyumudal - Redisari Pembangunan Jalan Korowelang - Mulyosri Pembangunan Jalan Donorojo - Kedungwringin Pembangunan Pedestrian Perkotaan Prembun Pembangunan Pedestrian Perkotaan Gombong
1.03.10.2.01.0069	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	Rp62.429.975.102,00	21	KM	Pemeliharaan Berkala Jalan Banjaran - Kaliputih Pemeliharaan Berkala Jalan Bocor - Kejayan Pemeliharaan Berkala Jalan Demangsari - Boyowulung Pemeliharaan Berkala Jalan Gombong - Kuwarasan Pemeliharaan Berkala Jalan Jembangan - Balingasal Pemeliharaan Berkala Jalan Kalijirek - Alian Pemeliharaan Berkala Jalan Kambalan - Ambal Pemeliharaan Berkala Jalan Karanganyar - Kemujan Pemeliharaan Berkala Jalan Karanggayam - Kebakalan Pemeliharaan Berkala Jalan Kawedusan - Sruni Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungwinangun - Bendogarap Pemeliharaan Berkala Jalan Kemujan - Mangli Pemeliharaan Berkala Jalan Klirong - Petanahan Pemeliharaan Berkala Jalan Kritig - Petanahan Pemeliharaan Berkala Jalan Muktisari - Bocor Pemeliharaan Berkala Jalan Petanahan - Puring Pemeliharaan Berkala Jalan Pringtutul - Jatijajar Pemeliharaan Berkala Jalan Purwogondo - Buayan Pemeliharaan Berkala Jalan Rogodono - Gondosuli Pemeliharaan Berkala Jalan Rowokele - Banyumudal Pemeliharaan Berkala Jalan Soka - Klirong Pemeliharaan Berkala Jalan Sruni - Krakal Pemeliharaan Berkala Jalan Tebo - Goa Petruk Pemeliharaan Berkala Jalan Tembono - Peniron Pemeliharaan Berkala Jalan Wonosari - Kembaran Pemeliharaan Berkala Jalan Arjowinangun - Banjurmukadan Pemeliharaan Berkala Jalan Karanganyar - Adimulyo
1.03.10.2.01.0061	1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	Rp1.100.000.000,00	8	meter	Pemeliharaan Berkala Jembatan Indrosari Ruas Jalan Wonosari - Kembaran

No. Rek	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Pagu Anggaran	Target	Satuan	Lokasi Ruas Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01.0043	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	Rp1.000.000.000,00	5	Jembatan	Pemeliharaan Jembatan Kali Salak Ruas Jalan Purwodeso - Petanahan ,Jembatan Turus Ruas Jalan Purwodeso - Petanahan ,Jembatan Wangon Ruas Jalan Kawedusan - Sruni ,Jembatan Irian Ruas Jalan Wero - Semondo ,Jembatan Gondosuli Ruas Jalan Rogodono - Gondosuli Dan Jembatan Lainnya
1.03.10.2.01.0051	1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	Rp31.376.290.000,00	10	KM	Pelebaran Jalan Bonorowo - Pujodadi Pelebaran Jalan Karangduwur - TPI Pelebaran Jalan Karangsambung - Giritirto Pelebaran Jalan Kedungbajul - Poncowarno Pelebaran Jalan Kemukus - Purwodadi Pelebaran Jalan Kepudang - Kaleng Pelebaran Jalan Tanggeran - Plarangan Pelebaran Jalan Adiluhur - Kalipurwo Pelebaran Jalan Jatinegara - Purbowangi Pelebaran Jalan Kabekelan - Lembupurwo Pelebaran Jalan Kuwarasan - Puring Pelebaran Jalan Peneket - Sidoluhur Pelebaran Jalan Sruweng - Kritig Pelebaran Jalan Jatiroto - Banyumudal Pelebaran Jalan Gumenter - Kabuaran
1.03.10.2.01.0049	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	Rp11.794.148.000,00	64	meter	Pembangunan Jembatan Brangkal II Desa Klopogodo Ruas Jalan Karanggayam - Klopogodo Pembangunan Jembatan Kalongbali Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar
Total Pagu			Rp181.005.445.312,00			